

**ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR**

RIZAL HISBULLAH PASCANARKI

NPP. 28.1541

Asdaf Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara

Program Studi Keuangan Daerah

Email: rizalhisbullah99@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement (GAP): The problems observed in this study include the fact that Ngawi District is still very dependent on transfer funds from the central and provincial levels in the implementation of the regional autonomy system. In addition, the pandemic problem that hit Ngawi Regency has caused the economy to become paralyzed. **Purpose:** The purpose of the research carried out by this author is to determine the efforts made by the Ngawi Regency Government, especially the Ngawi Regency Financial Board in increasing financial independence in Ngawi Regency and to identify inhibiting and supporting factors in increasing the financial capacity of Ngawi Regency and contributing thoughts about strategies that need to be carried out by Local Government of Ngawi Regency in increasing local revenue. **Method:** The method used by the author is a combination research method (quantitative and qualitative) with the use of sequential explanatory research methods. The author uses data collection techniques using triangulation and financial ratio analysis techniques. **Result:** Based on the results of the research, it can be concluded that Ngawi Regency is not yet independent in its financial capacity to finance the running of the government. As for the most potential to increase PAD in Ngawi Regency in a relatively short period of time is to attract investors, in this case the industry, but what becomes an obstacle is the culture of the Ngawi people which is not suitable for industrial areas. **Conclusion:** As a result of this study, potential that suits the people of Ngawi is an increase in tourism, however, it is still in the process of being developed and is being introduced to the Indonesian people.

Keywords: Analysis, Independence, Local Revenue

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Permasalahan yang diamati dalam penelitian ini antara lain yaitu Kabupaten Ngawi masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat maupun provinsi dalam pelaksanaan sistem otonomi daerah. Ditambah lagi permasalahan pandemi yang menimpa Kabupaten Ngawi sehingga ekonomi menjadi lumpuh. **Tujuan:** Tujuan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ngawi khususnya Badan Keuangan Kabupaten Ngawi dalam meningkatkan kemandirian keuangan di Kabupaten Ngawi serta mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung dalam peningkatan kemampuan keuangan Kabupaten Ngawi serta memberi sumbangan pikiran tentang strategi yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi dalam meningkatkan PAD. **Metode:** Metode yang digunakan penulis adalah metode penelitian kombinasi (kuantitatif dan kualitatif) dengan penggunaan metode penelitian *sequential explanatory*. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi dan teknik analisis rasio keuangan. **Hasil/ Temuan:** Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Ngawi belum mandiri kemampuan keuangannya dalam membiayai berjalannya pemerintahan. Adapun yang paling berpotensi untuk meningkatkan PAD Kabupaten Ngawi dengan waktu yang relatif singkat adalah dengan menarik investor dalam hal ini adalah industri, namun yang menjadi kendala adalah kultur dari masyarakat Ngawi yang tidak cocok dengan daerah industri. **Kesimpulan :** Hasil dari penelitian ini, Potensi yang paling cocok dengan masyarakat Ngawi adalah peningkatan pariwisata namun hingga saat ini masih dalam proses pengembangan dan sedang diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia.

Kata Kunci : Analisis, Kemandirian, Pendapatan Asli Daerah (PAD).

A. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di setiap daerah pastinya berbeda tergantung dari kemampuan daerah, kondisi geografis, serta keadaan sosial budaya masyarakat di daerah tersebut. Dimuat dalam UU no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, adanya kebijakan dimana daerah berhak mengatur, mengurus serta bertanggung jawab atas daerah otonom sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi daerahnya, dari kebijakan tersebut diharapkan kesejahteraan umum dapat terwujud. Memanfaatkan tersedianya potensi dan sumber daya daerah sekaligus mengandalkan partisipasi masyarakat hal ini mampu mendorong pengoptimalan pembangunan daerah. Hal tersebut menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam penerapan Otonomi Daerah.

Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan kegiatan Pemerintahan sebagai wujud fungsi otonomi harus memiliki kemampuan keuangan daerah yang mumpuni guna pembiayaan pelaksanaan kegiatan tersebut. Akibat pelaksanaan fungsi otonomi daerah, sumber keuangan harus dimiliki Pemerintah Daerah untuk membiayai penyelenggaraan otonomi tersebut. Kabar baiknya Pemerintah Daerah mendapatkan hak untuk mengambil pemasukkan dari potensi yang dikelola daerah. Selain hak yang didapatkan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan. Dimana penyelenggaraan urusan ini memerlukan anggaran yang harus ditanggung Pemerintah Daerah tersebut. Karena itu Pemerintah Daerah dituntut untuk bisa mandiri dalam urusan pengelolaan keuangannya.

Berikut tabel yang menunjukkan presentase perekonomian di Kabupaten Ngawi dari 2016 – 2019:

Tabel 1.

Data Pendapatan Domestik Regional Bruto Tahun Anggaran 2016-2019

Keterangan	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Laju Pertumbuhan	5,21	5,07	5,26	5,05

Sumber : *ngawikab.bps.go.id*, diolah oleh penulis (2020)

Berdasarkan diagram di atas persentase PDRB Kabupaten Ngawi 2016-2019 masih belum stabil. Artinya potensi penerimaan daerah setiap tahunnya belum stabil. Kestabilan ekonomi menjadi faktor penting dalam rangka mendorong terciptanya sebuah kemandirian daerah. Penulis menyimpulkan dari diagram di atas bahwa kemandirian keuangan Kabupaten Ngawi perlu diperhitungkan lagi mengingat belum stabilnya laju PDRBnya di tahun - tahun sebelumnya ditambah lagi permasalahan pandemi di tahun 2020

ini yang bisa dipastikan PDRBnya akan turun. Hal ini menjadi tugas berat Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Ngawi dalam memandirikan keuangannya.

Berdasarkan diagram di atas persentase PDRB Kabupaten Ngawi 2016-2019 masih belum stabil. Artinya potensi penerimaan daerah setiap tahunnya belum stabil. Kestabilan ekonomi menjadi faktor penting dalam rangka mendorong terciptanya sebuah kemandirian daerah. Penulis menyimpulkan dari diagram di atas bahwa kemandirian keuangan Kabupaten Ngawi perlu diperhitungkan lagi mengingat belum stabilnya laju PDRBnya di tahun - tahun sebelumnya ditambah lagi permasalahan pandemi di tahun 2020 ini yang bisa dipastikan PDRBnya akan turun. Hal ini menjadi tugas berat Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Ngawi dalam memandirikan keuangannya.

1.2 Permasalahan

Permasalahan yang ada di Kabupaten Ngawi yang pertama, ketergantungan dana Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam pelaksanaan fungsi Pemerintah an, pembangunan, serta kemasyarakatan belum sepenuhnya dapat dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga masih mengandalkan dana transfer bantuan dari pusat yang persentasenya tidak bisa dibilang kecil. kedua, masih rendahnya penyerapan pendapatan Asli Kabupaten Ngawi. Padahal hal tersebut menjadi faktor penting dalam peningkatan penerimaan daerah sehingganya nantinya Kabupaten Ngawi bisa berdikari dalam pengelolaan daerahnya. Ketiga, karena masih belum stabilnya perekonomian di Kabupaten Ngawi, artinya pendapatan daerah juga belum stabil.

1.3 Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Febby Randria Ramadhani berjudul Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Di Kota Tarakan Tahun 2010 – 2015 (FR Ramadhani, 2016), menemukan bahwa Kota tarakan sudah mandiri dalam kemandirian keuangannya dilihat dari pola delegatif dalam perhitungannya. Berdasarkan perhitungannya juga efektivitas keuangan Kota Tarakan dinilai cukup efektif bahkan pada beberapa tahun meningkat menjadi sangat efektif. Penelitian Aris Rante, Muhammad Saleh Mire, Ardi Paminto berjudul Analisis Kemandirian Keuangan Daerah (Aris Rante,dkk., 2018), menemukan bahwa belanja langsung berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Malinau. Hasil analisis substruktur pertama menunjukkan bahwa Belanja Langsung berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Malinau. Tidak signifikan pengaruh belanja langsung ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja langsung yang dilakukan pemerintah Kabupaten Malinau belum menunjukkan pengeluaran atau belanja yang efektif dan efisien.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Analisis

Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Ngawi yang dimana penelitian ini diambil pada saat terjadi Pandemi *COVID – 19*. Menggunakan indikator berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat Mahmudi (Mahmudi, 2010) yang menyatakan bahwa untuk mengukur kemandirian suatu daerah memerlukan pengukuran rasio keuangan yaitu rasio kemandirian, rasio ketergantungan, dan rasio derajat desentralisasi.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai kemandirian keuangan Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur khususnya pada masa Pandemi COVID-19.

II. Metode

Metode yang penulis gunakan adalah penelitian kombinasi dengan metodologi *sequential explanatory*, ini penulis lakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat serta memperkuat pemahaman dari penjelasan yang diberikan, ataupun saling memperkuat instrumen penelitian sesuai dengan kebutuhan peneliti. Metode ini memadukan simbol numerik yang digunakan untuk mengukur sebuah variabel (kuantitatif) dan pengamatan fenomena yang ada lebih ditekankan guna mengamati substansi dari fenomena tersebut (kualitatif). Untuk mendapatkan hasil dari statistik kuantitatif ini maka dipadukan dengan mengobservasi atau mewancarai sejumlah individu guna memperoleh penjelasan dari hasil hitungan statistik tersebut. Analisis data yang digunakan penulis dalam magang penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Data kuantitatif sebagai instrumen awal dalam melakukan penelitian dengan melakukan perhitungan kemandirian keuangan yang diukur dari rasio yang telah ditentukan berdasar laporan keuangan Kabupaten Ngawi. Maka data yang digunakan adalah berbentuk numerik atau angka(kuantitatif). Kemudian dari data tersebut penulis melakukan perhitungan matematik, dengan penghitungan keuangan yang digunakan adalah :

- a) Rasio Derajat Desentralisasi

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100$$

Hasil perhitungan di atas lalu dicocokkan dengan kriteria yang telah ditentukan menurut Badan Litbang Depdagri dan Fisipol UGM (1991) :

- 1) 0,00% s/d 10% : sangat kurang
- 2) 10,1% s/d 20% : kurang
- 3) 20,1% s/d 30% : cukup.
- 4) 30,1% s/d 40% : baik
- 5) 40,1% s/d 50% : sangat baik
- 6) > 50% : memuaskan

- b) Rasio Ketergantungan :

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan di atas lalu dikriteriakan sesuai yang telah

ditentukan menurut Badan Litbang Depdagri dan Fisipol UGM (1991);

- 1) 0,00 s/d 10 : sangat rendah
- 2) 10,1 s/d 20 : rendah
- 3) 20,1 s/d 30 : sedang
- 4) 30,1 s/d 40 : cukup
- 5) 40,1 s/d 50 : Tinggi
- 6) > 50 : Sangat tinggi

c) Rasio Kemandirian :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Dana Transfer pusat+provinsi+pinjaman}} \times 100\%$$

Hasil yang diperoleh dari perhitungan di atas lalu dicocokkan dengan kriteria yang telah ditentukan menurut Halim, (2004:189) yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.

Pola tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah

Kemandirian Daerah	Rasio Kemandirian (%)	Pola hubungan
Rendah Sekali	0 -25	Instruktif
Rendah	>25 – 50	Konsultatif
Sedang	>50 – 75	Partisipatif
Tinggi	>75 – 100	Delegatif

III. Hasil Dan Pembahasan

1. Perkembangan Keuangan Kabupaten Ngawi

Perkembangan keuangan Kabupaten Ngawi dapat dilihat dari perubahan realisasi anggaran pendapatan dan belanja (APBD) atau pada dokumen laporan realisasi anggaran (LRA) dari tahun ke tahun, khususnya 4 tahun terakhir 2017 – 2020. Dalam perkembangan APBD tersebut dapat dilihat masih tingginya ketergantungan daerah terhadap bantuan dari Pemerintah pusat. Berdasarkan ruang lingkup sumber. Daerah oleh penulis 2021 magang penulis memfokuskan pada pendapatan daerah serta faktor – faktor yang menjadi tantangan dalam peningkatan pendapatan Kabupaten Ngawi.

Perkembangan pendapatan daerah dapat dilihat pada laporan realisasi anggaran (LRA) dalam 4 tahun terakhir yaitu dari 2017 – 2020. Gambaran mengenai keuangan daerah dapat dilihat APBD, dimana dalam anggaran tersebut tercantum pos – pos penerimaan dan pengeluaran daerah. Untuk lebih jelasnya, hal tersebut dapat dilihat pada tabel target dan realisasi APBD Kabupaten Ngawi tahun anggaran 2017-2020. Berikut adalah gambaran keuangan Kabupaten Ngawi 4 tahun terakhir:

Tabel 3.

Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2017 – 2020

Tahun	Indikator	
	Target Pendapatan Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah
2017	1.977.584.369.655,24	1.996.610.762.917,14
2018	1.990.841.443.197,85	2.081.414.776.036,87
2019	2.136.547.654.089,57	2.202.023.202.926,80
2020	2.080.394.828.837,26	1.934.845.466.348,80

Sumber : Dokumen LRA Kabupaten Ngawi, diolah oleh penulis (2021)

Tabel 4.

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2017-2020

Tahun	Indikator	
	Target PAD	Realisasi PAD
2017	251.396.928.897,24	275.304.460.380,14
2018	204.844.385.276,60	223.830.810.376,26
2019	211.009.104.998,57	255.080.331.088,80
2020	232.017.239.267,26	270.181.916.011,80

Sumber : Dokumen LRA Kabupaten Ngawi, diolah oleh penulis (2021)

Tabel 5.

Dana Transfer Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2017-2020

Tahun	Indikator			
	Bagi Hasil Pajak dan non pajak	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus	Total Dana Transfer
1	2	3	4	5
2017	65.798.320.241	1.039.619.057.000	302.818.431.695	1.408.235.808.936
2018	111.935.345.666	1.039.619.057.000	334.579.617.361	1.486.134.020.027
2019	92.620.770.534	1.072.348.573.000	336.856.691.503	1.501.826.035.037
2020	94.754.696.598	980.835.712.000	319.126.252.035	1.394.716.660.633

Sumber : Dokumen LRA Kabupaten Ngawi, diolah oleh penulis (2021)

2. Rasio Keuangan

a. Derajat Desentralisasi

Rasio ini merupakan perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah, dimana semakin besar nilai dari pendapatan asli daerah maka semakin tinggi pula derajat desentralisasinya. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100$$

Penulis melakukan perhitungan rasio derajat desentralisasi di Kabupaten Ngawi selama 4 (empat) tahun anggaran berdasarkan data yang diteliti yakni mulai dari 2017 sampai dengan tahun 2020 sesuai dengan rumus perhitungan rasio derajat desentralisasi, yaitu:

- a. Tahun 2017 = $\frac{275.304.460.380}{1.996.610.762.917} \times 100\% = 13,79\%$
- b. Tahun 2018 = $\frac{223.830.810.376}{2.081.414.776.036} \times 100\% = 1,1\%$
- c. Tahun 2019 = $\frac{255.080.331.088}{2.202.023.202.926} \times 100\% = 11,58\%$
- d. Tahun 2020 = $\frac{270.181.916.011}{1.934.845.466.348} \times 100\% = 13,96\%$

Tabel 6.
Hasil Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2017-2020

Indikator	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Rasio	13,79%	1,1%	11,58%	13,96%
Trend	-	-12,69%	10,48%	2,38%
Kriteria	Kurang	Sangat Kurang	Kurang	Kurang

Sumber : LRA Kabupaten Ngawi, diolah oleh penulis (2021)

b. Rasio Ketergantungan

Rasio ini menunjukkan tingkat ketergantungan Pemerrintah Daerah Kabupaten Ngawi terhadap dana dari pihak eksternal terutama dana transfer (pusat dan provinsi). Pada dasarnya tujuan dari perhitungan rasio ini sama dengan rasio kemandirian keuangan daerah, namun ada sedikit perbedaan yaitu dari segi cara perhitungannya dimana rasio ketergantungan ini adalah kebalikan dari cara perhitungan rasio kemandirian dan terdapat sedikit perbedaan dalam hal komponen yang diukur. Rumus rasion ini sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus di atas, perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah di Kabupaten Ngawi selama 4 (empat) tahun anggaran berdasarkan data yang penulis teliti yakni mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, ialah sebagai berikut:

- a. Tahun 2017 = $\frac{1.408.235.808.936}{1.996.610.762.917} \times 100\% = 70,53\%$
- b. Tahun 2018 = $\frac{1.486.134.020.027}{2.081.414.776.036} \times 100\% = 71,4\%$

$$c. \text{ Tahun 2019} = \frac{1.501.826.035.037}{2.202.023.202.926} \times 100\% = 68,2\%$$

$$d. \text{ Tahun 2020} = \frac{1.394.716.660.633}{1.934.845.466.348} \times 100\% = 72,08\%$$

Tabel 7.

Hasil Rasio Ketergantungan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2017-2020

Indikator	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5
Rasio	70,53%	71,4%	68,2%	72,08%
Trend	-	0,87%	-3,2%	3,88%
Kriteria	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Sumber : LRA Kabupaten Ngawi, diolah oleh penulis (2021)

c. Rasio Kemandirian Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah digunakan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan Pemerintah secara mandiri, baik dalam pembangunan maupun pelayanan masyarakat. Untuk mengetahui kemampuan daerah tersebut digunakanlah rasio kemandirian keuangan yaitu dengan cara membandingkan unsur PAD dengan dana transfer pusat maupun provinsi ditambah pinjaman apabila daerah memiliki pinjaman.

Rasio kemandirian keuangan ini menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana yang berasal dari pihak eksternal. Selain itu, rasio kemandirian keuangan ini juga menggambarkan kemampuan keuangan yang bersumber dari daerah itu sendiri dalam membiayai otonomi daerah. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut:

Rasio Kemandirian:

$$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Dana Transfer dari pusat dan daerah} + \text{Pinjaman}} \times 100$$

Berdasarkan rumus di atas, perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Ngawi selama 4 (empat) tahun anggaran berdasarkan data yang diteliti oleh penulis yakni mulai dari 2017 – 2020 ialah sebagai berikut:

- a. Tahun 2017= $\frac{275.304.460.380}{1.408.235.808.936+313.070.493.601} \times 100\% = 15,99\%$
- b. Tahun 2018= $\frac{223.830.810.376}{1.486.134.020.027+371.449.945.633} \times 100\% = 12,05\%$
- c. Tahun 2019= $\frac{255.080.331.088}{1.501.826.035.037+445.116.836.801} \times 100\% = 13,1\%$
- d. Tahun 2020= $\frac{270.181.916.011}{1.394.716.660.633+269.946.889.704} \times 100\% = 16,23\%$

Tabel 8.

Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2017-2020

Indikator	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Rasio	15,99%	12,05%	13,1%	16,23%
Pola Hubungan	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif

Sumber : LRA Kabupaten Ngawi, diolah oleh penulis (2021)

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Pererapan Pembatasan Sosiasl Berskala Besar (PSBB) memiliki dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya kebijakan ini mampu menekan percepatan penularan virus COVID-19 walaupun hasilnya tidak signifikan. Dampak negatifnya masyarakat banyak kehilangan mata pencahariannya, akibatnya perekonomian menurun. Tidak berhenti di sini, setelah kebijakan PSBB ini berlanjut diberlakukannya kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), dimana kebijakan ini tetap membatasi mobilisasi masyarakat namun masyarakat diperbolehkan bekerja dengan menaati ketentuan dan protokol kesehatan yang berlaku. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Ngawi akhirnya mengambil kebijakan berupa pembebasan pajak dan restribusi untuk para pelaku ekonomi serta memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang dirasa sangat membutuhkan dengan harapan mampu memulihkan perekonomian. Akibat dari pandemi ini, keuangan Kabupaten Ngawi ikut menurun dikarenakan realokasi anggaran yang difokuskan untuk penanganan COVID-19 alhasil pembangunan yang telah direncanakan terhambat. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam rangka penanganan COVID-19 mengambil kebijakan dengan menutup tempat wisata. Penutupan tempat wisata ini tentunya berdampak pada penurunan PAD Kabupaten Ngawi dan juga berhentinya perekonomian masyarakat khususnya disekitar tempat wisata.

IV Kesimpulan

a. Rasio Keuangan

Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Ngawi pada tahun anggaran 2017 – 2020, maka secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa kemampuan keuangan daerah Kabupaten Ngawi masih kurang dalam membiayai Pemerintah aannya. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil analisis rasio keuangan dengan rata-rata besarnya derajat Desentralisasi fiskal dalam waktu 4 (empat) tahun anggaran adalah 10,11% sehingga masuk klasifikasi “kurang”, analisis rasio ketergantungan daerah menunjukkan rata – rata besarnya rasio yaitu 70,55% sehingga masuk klasifikasi “sangat tinggi”, sedangkan untuk rasio kemandirian daerah Kabupaten Ngawi dalam kurun waktu 4(empat) tahun anggaran adalah 14,34% dan termasuk pola “instruktif”. Sehingga dari ketiga rasio di atas penulis menyimpulkan bahwa Kabupaten Ngawi ini belum mandiri dari segi keuangannya. Pemerintah Daerah masih belum mampu berdiri sendiri dalam membiayai kebutuhan daerahnya dan masih harus bergantung pada bantuan dari pusat maupun provinsi.

b. Faktor Penghambat Terjadinya Kemandirian Keuangan Daerah

Penulis menyimpulkan faktor utama yang menjadi penghambat terjadinya kemandirian daerah ini adalah masih kecilnya PAD Kabupaten Ngawi sehingga minim kontribusinya didalam APBD, dan masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Di tahun 2020 pada situasi pandemi seperti ini dimana ada pembebasan pada sektor-sektor pajak tertentu walaupun tidak terlalu berpengaruh pada pendapatan pajak yang tembus hingga 117,37%, tetapi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya Realisasi pendapatan pada sektor pajak mengalami penurunan. Di sektor Restribusi bila mengacu pada APBD sebelum perubahan, realisasi tidak mencapai 100% target yang sudah ditentukan. Namun setelah adanya APBD Perubahan dimana target dari restribusi dikurangi hampir 40% dari yang sebelumnya ditetapkan, maka realisasinya tembus hingga 126,36%. Meskipun begitu tetap terjadi penurunan Restribusi dari tahun sebelumnya.

c. Upaya Pemerintah Dalam Menguatkan Perekonomian

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam usahanya menguatkan perekonomian pada saat ini adalah membebaskan para pelaku ekonomi dari pajak dan restribusi hingga keadaan normal kembali. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Ngawi mencoba menarik investor untuk mengembangkan usahanya di Ngawi sehingga mampu menyerap lapangan kerja baru.

d. Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam usahanya meningkatkan PAD adalah mengembangkan sektor pariwisata yang sekarang ini sedang digarap, menarik para investor untuk mengembangkan usaha maupun industri di Kabupaten Ngawi dengan keringanan tertentu sehingga nantinya mampu meningkatkan PAD, melakukan promosi-promosi keluar daerah dengan berbagai media salah satunya sekarang dari *youtube* melalu para *influencer*, serta tetap *update* dan melakukan pemutakhiran data para wajib pajak. Dari upaya yang Penulis sebutkan di atas Pemerintah Kabupaten Ngawi mengharapkan Kabupaten Ngawi lebih maju dan bisa mandiri dalam mengelola daerahnya.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni

waktu dan adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang di terapkan di Kabupaten Ngawi sehingga penelitian ini dapat dilakukan dengan keterbatasan tempat di karenakan adanya larangan untuk melakukan perkerumunan di tempat umum maupun kantor.

Arah Masa Depan Penelitian. Penulis menyadari bahwa awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa di Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi beserta para jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. Daftar Pustaka

- Abdul Halim. 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Arikunto. Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bird. Richard. 2000. *Desentralisasi Fiskal di Negara-Negara Berkembang*; PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Bird RM, Smart M. 2002. *Intergovernmental fiscal transfers: international lessons for developing countries*. World Dev. 30:899–912
- Creswell, J. W. 2007. *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (2nd ed.). Thousand Oaks, California: SAGE
- Hesse-Biber, S. N. 2010. *Mixed Methods Research: Merging Theory with Practice*. New York: The Guilford Press.
- Ibnu Syamsi. 1986. *Pokok-Pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemrograman, Dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional Dan Regional*. Jakarta: CV Rajawali.
- Kansil, C, S, T, 2009 *Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mahmudi, 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Kedua*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

- Mardiasmo,1999. Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berorientasi Pada Kepentingan Publik, PAU Studi Ekonomi UGM, Yogyakarta.
- Moleong.2007.*Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:Remaja Rosdakarya
- Muluk, Khairul M.R, 2007, Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah, Edisi Pertama, Bayumedia Publishing, Malang Jawa Timur.
- Mulyana, Budi. 2006. Perspektif Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan APBD di Indonesia. Edisi Pertama, Jakarta : LPKPAP.
- Nazir, Moh 2013 . *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Rasyid, M, R, Gattar, A, Syauckani. 2010, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Reksohadiprodo, Sukanto, 2001, Ekonomika Publik, Yogyakarta:BPFE
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. Metodologi Penelitian Kualitatif. 2013. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Yani, Ahmad. 2009. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yusuf. A Muri. 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia

